

HISTORIC

JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN SEJARAH

**DONGENG ANAK NUSANTARA RADIO EDUKASI SEBAGAI MEDIA
PENANAMAN NILAI KARAKTER BANGSA**

Innayah

**PERAN YOGYAKARTA DALAM PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1946-1949**

Diyana dan John Sabari

**ANALISIS KRITIS TENTANG PROSES NORMALISASI HUBUNGAN
DIPLOMATIK INDONESIA DAN MALAYSIA (Kajian Sejarah Politik
Hubungan Bilateral Tahun 1960 - 1970)**

Gunawan Sridiyatmiko

WANITA DALAM PERGERAKAN NASIONAL DI MINANGKABAU

Sri Batini dan Sri Pawiti

**PERANAN RAKYAT BANTUL DALAM MENGHADAPI AGRESI MILITER
BELANDA II**

Wahyudi



Diterbitkan Oleh:

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta**

JL. IKIP PGRI I Sonosewu 117 PO BOX 1123 Yogyakarta 55128

Telp. (0274) 373198

HISTORIC

JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN SEJARAH

DAFTAR ISI

**DONGENG ANAK NUSANTARA RADIO EDUKASI SEBAGAI MEDIA
PENANAMAN NILAI KARAKTER BANGSA**

Innayah(1 – 16)

**PERAN YOGYAKARTA DALAM PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1946-1949**

Diyana dan John Sabari (17 – 29)

**ANALISIS KRITIS TENTANG PROSES NORMALISASI HUBUNGAN
DIPLOMATIK INDONESIA DAN MALAYSIA**

(Kajian Sejarah Politik Hubungan Bilateral Tahun 1960-1970)

Gunawan Sridiyatmiko (30 – 40)

WANITA DALAM PERGERAKAN NASIONAL DI MINANGKABAU

Sri Batini dan Sri Pawiti (41 – 46)

**PERANAN RAKYAT BANTUL DALAM MENGHADAPI AGRESI MILITER
BELANDA II**

Wahyudi (47 – 51)

ANALISIS KRITIS TENTANG PROSES NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA DAN MALAYSIA

(Kajian Sejarah Politik Hubungan Bilateral Tahun 1960-1970)

*Gunawan Sridiyatmiko**

ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kajian kritis tentang latar belakang historis mengapa Indonesia menjalankan politik luar negeri konfrontatif terhadap Malaysia pada masa 1960-1970, Apa alasan diberlakukannya politik normalisasi dengan Malaysia ? Bagaimana kebijakan/bentuk-bentuk normalisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia ? Penelitian ini merupakan penelitian historis Metodologi Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah kritis, dengan tahap-tahap penelitian: pemilihan dan seleksi sumber-sumber subyek (sejarah), kritik sumber yakni kritik secara intern dan ekstern ketiga, sumber-sumber tersebut dianalisa dengan pendekatan berdasarkan konsep-konsep dan variabel yang relevan; keempat, selanjutnya sumber-sumber yang dapat dipercaya tersebut disusun dalam suatu ceritera sejarah, yang disebut historiografi atau penulisan sejarah . Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi politik konfrontatif maupun upaya normalisasi terhadap Malaysia yakni : Aspek sejarah dan kemauan subyektif manusia Indonesia (kepemimpinan nasional), aspek geopolitik Indonesia dan aspek perkembangan politik dan ekonomi Internasional.

Kata Kunci : Analisis kritis, Normalisasi, Indonesia dan Malaysia

* *Gunawan Sridiyatmiko M.Pd adalah Dosen Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta*

LATAR BELAKANG

Beberapa tahun yang lalu hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia sempat mengalami sedikit ketegangan. Hal ini disebabkan persengketaan atas pulau Sipadan dan Ligitan yang masing-masing negara mengklaim menguasai pulau tersebut. Sengketa ini semakin memanas manakala ulah oknum angkatan laut Diraja Malaysia yang sengaja melanggar batas wilayah perairan Indonesia yang dianggapnya adalah wilayah perairan laut Malaysia (Kompas, 2008). Sengketa ini semakin membuat panas hati bagi sebagian besar bangsa Indonesia, terutama bagi golongan muda kita hingga meraka membentuk front-front pembela tanah air yang setiap saat siap berangkat untuk menyerbu Malaysia.

Meskipun Malaysia mengembangkan kawasan sengketa pasca lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan guna mendatangkan devisa dari sektor pariwisata, sikap politik luar negeri Indonesia masih enggan untuk menyelesaikan perkara yang diperkirakan akan menimbulkan sengketa atau konflik serius. Secara historis sebenarnya konflik ini telah carut marut antara kepentingan politik bilateral dan ekspos dagang pers yang sengaja dihembuskan sebagaimana pernah dikemukakan oleh Aifitra Salam, staf peneliti LIPI (Kompas, 26 Juli 1991). Dalam penjelasannya Aifitra mengatakan bahwa sebenarnya para pejabat Malaysia tahu secara pasti bahwa yang dihadapi ini adalah perang pers yang lebih responsive daripada para pejabat Negara Indonesia yang justru lebih pasif terkesan menunggu. Sejarah hubungan bilateral politik Indonesia dan Malaysia secara historis sangat menarik karena telah mengalami pasang surut. Dalam masa pemerintahan Orde Baru kepentingan nasional nampak pada penekanan stabilitas nasional dan regional dalam menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu sikap Indonesia tercermin dalam politik luar negerinya dalam menghadapi masalah sengketa tersebut tidak terlepas dari usaha menyempurnakan hubungan bilateral dua negara serumpun ini. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang cukup baik termanifestasi dalam kebersamaan wadah regional yang tergabung dalam ASEAN.

Sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia mempunyai karakteristik yang sangat menarik, yaitu berkembangnya politik konflik yang sangat panjang. Lihat saja pada tahun 1957/1958 sewaktu Indonesia menghadapi gerakan separatis PRRI/Permesta, dimana beberapa pangkalan militer Inggris di Semenanjung Malaya terlihat sebagai pangkalan agresi. Juga pemberian suaka kepada beberapa tokoh pelarian ke Kuala Lumpur. Ketegangan

tersebut memuncak menjadi konfrontasi pada waktu tahun 1962/1963 di Brunai terjadi pemberontakan oleh sekelompok orang yang menamakan diri Partai Rakyat Kalimantan Utara, dengan tentara nasionalnya untuk pembebasan Kalimantan Utara dari konolialisme Inggris. Gerakan ini menentang penggabungan Kalimantan Utara yaitu : Serawak Sabah dan Brunai kedalam Federasi Malaysia. Gerakan ini mendapat angin dari Jakarta, untuk itu presiden Soekarno mengomandokan " Ganyang Malaysia " , dengan Dwikora . Konfrotasi yang bersifat militer, ekonomi dan politik tersebut tidak menempatkan hasil yang menyebabkan kerugian bagi Indonesia, karena bagaimanapun juga Federasi Malaysia tetap berdiri dan untuk itu Indonesia harus membayar mahal dengan kemerosotan ekonomi dan hubungan yang buruk dengan negara tetangga serta terisolasi .

Kebijakan politik luar negeri suatu negara akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan orientasi dan prioritas dari kepentingan nasional atau politik dalam negeri suatu negara tersebut. Seperti yang terjadi dari hasil pergeseran plitik dalam negeri di Indonesia. Dimana Angkatan Darat dengan orde baru muncul dalam peraturan politik nasional menggantikan era Soekarno. Maka babak baru dalam format politik dalam negeri mulai berhembus yang termanifestasikan dalam mereevaluasi kebijakan politik luar negeri yang revolusioner dan kontratif khususnya terhadap Malaysia. Proses peristiwa konfrontasi menuju normalisasi tidak akan bisa terlepas dari peranan dan kegiatan intelegen Angkatan Darat yang kemudian dipadukan dengan jalur diplomatik oleh kementerian Luar Negeri di bawah Adam Malik. Setelah turunnya Super Semar dibawah Suharto, seterusnya reevaluasi dan reorientasi kebijakan politik luar negeri semakin terbuka dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS No. XII tanggal 5 Juli 1966 sebagai landasan operasional dari kebijakan politik luar negeri. Kemudian disusul dengan UU NO. 5 tahun 1966 tentang persetujuan persetujuan untuk normalisasi hubungan antara republik Indonesia dan Malaysia. Dalam usaha untuk menciptakan suasana damai dikawasan Asia Tenggara, pemerintahan Orde Baru di samping menghentikan konfrontasi dengan malaysia, juga merintis dibentuknya organisasi regional Asean. Kebijakan ini lebih memperlihatkan sikap pada negara-negara tetangga bahwa kebijakan konfrontasi yang sebelumnya dilakuakn sudah ditinggalkan, dengan harapan untuk menciptakan situasi politik yang lebih stabil guna menjaga pelaksanaan pembangunan nasionalnya.

Ada beberapa catatan penting dalam memahami pelaksanaan politik luar negeri Indonesia khususnya dengan Malaysia sebagai suatu proses konflik kearah kejasama atau konfrontasi menuju normalisasi dapat dianalisis sebagai suatu proses sosial politik (Soerjono Soekanto, 1987). Maksudnya politik luar negeri digerakan oleh suatu keputusan pemerintah, dimana sekali keputusan dibuat, pelaksanaannya menyebabkan adanya suatu proses sosial politik yang harus ditempuh dalam suatu konsekuensi logis sebagai upaya aktif oleh pemerintah Indonesia guna mencapai keberhasilannya. Dalam implementasinya ada 3 hal dalam proses sosial yang dimaksud, yaitu kerja sama, konflik, dan hidup berdampingan. Masalah hubungan bilateral dua negara ini sebenarnya sudah mendapat perhatian yang luas dari beberapa sarjana, meskipun kebanyakan lebih cenderung kepada masalah konfrontasinya. Ini dimaklumi berkaitan dengan sifat dari Sejarah Politik yang lebih cenderung pada tema-tema konfrontatif dan kekuasaan. Farnklin Weinstein dalam bukunya yang berjudul *Indonesia Abandone Cofrontations*, mencoba untuk mengungkap bagaimana terjadinya konfrontasi Indonesia Malaysia sebagai suatu kondisi persaingan politik antara partai Komunis Indonesia dengan angkatan bersenjata khususnya AD. Sementara itu menurut J. A. C. Mackie dalam bukunya yang berjudul *The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966*. menjelaskan bahwa kebijakan Sukarno dalam konfrontasi malaysia tidak terlepas dari pengaruh Komunis dalam upaya pengalihan perhatian politik domestik Indonesia. Melihat dari permasalahan dan beberapa kepustakaan yang telah terurai di depan tentang hubungan bilaterai antara Indonesia dan Malaysia ada sesuatu yang belum tersentuh, yaitu analisis tentang proses normalisasi, alasan-alasan dan bentuk dari normalisasi serta realisasi-realisis bentuk normalisasinya. Fakta-fakta sejarah ini merupakan beberapa alasan penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Malaysia dengan judul analisis Pokitik Tentang Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik Indinesia dan Malaysia: Sebuah Kajian Sejarah Politik Tentang Pasang Surut Hubungan Bilateral Indonesia Malasysia Tahun 1960 - 1070.

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan di atas dapat dirumuskan 1. Mengapa Indonesia menjalankan politik luar negeri yang konfrontatif terhadap Malaysia pada masa 1960- 1970 ? Apa alasan diberlakukannya politik normalisasi dengan Malaysia ? Bagaimana kebijakan/bentuk-bentuk normalisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia ?

KAJIAN PUSTAKA

Istilah Konfrontasi

Istilah konfrontasi diartikan lebih dari sekedar perang kata-kata, tetapi menjurus ke konflik fisik namun belum dianggap sebagai peperangan. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia yang disebut sebagai konfrontasi adalah merupakan bagian dari sejarah hubungan bilateral dua negara yang bertetangga dan serumpun.

Kebijakan konfrontasi dengan Malaysia pada masa Soekarno sebenarnya adalah sebuah jawaban terhadap sikap politik pada masa Demokrasi terpimpin dan merupakan jawaban atas kepentingan nasional yang merupakan tujuan untuk situasi kurun waktu yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia kala itu. Ini mengacu pada suatu konsep kerangka teori politik luar negeri, bahwa politik luar negeri adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman bagi tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran di luar negeri yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat keputusan. Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia merupakan pemenuhan kebutuhan dari kondisi politik nasional Indonesia.

Mengambil pendapat Henry Kesinger bahwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia merupakan produk dari masa demokrasi terpimpin di bawah kekuasaan Soekarno (1992: 87). Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dalam kajian sejarah politik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor (Yuwono Sudarsono, 1985 : 124) antara lain : 1. Sejarah dan kemauan subyektif manusia Indonesia, 2. Faktor geopolitik, 3. Arah perkembangan politik dan ekonomi internasional. Faktor Sejarah dan kemauan subyektifitas bangsa Indonesia Rasa bangga bangsa Indonesia atas sejarah yang mencatat bangsa Indonesia telah mencapai prestasi peradaban tinggi yang diunjukkan oleh eksistensinya dalam peradapan politik dunia pada masa lampau, misalnya dengan kebesaran kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram Hindu dan Mataram Islam.

Dalam masa pergerakan, kemenangan gemilang terhadap penjajahan balanda, pengusiran pendudukan Jepang dan sebagainya, juga merupakan faktor subyektif yang menjurus pada perasaan elitsitas bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

FAKTOR GEOPOLITIK

Faktor ini merupakan peluang atau pembatas bagaimana prinsip bebas aktif Indonesia diterapkan oleh pemerintah negara yang sedang berkuasa. Dalam hal ini kondisi dan keadaan geografis negara Indonesia sangat

menentukan terhadap strategi dan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Posisi strategis Indonesia yang terletak antara dua benua Asia dan Australia, dua samudra Pasifik dan Samodra Indonesia membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu dalam bidang Epoleksosbud Hankam. Dengan demikian dalam setiap percaturan politik internasional selalu melibatkan Indonesia baik itu yang membuat keuntungan dan kelemahan sebagai faktor geografis. Indonesia pada masa lalu secara ekonomi sangat menguntungkan karena berbagai kekayaan sumber alam sebagai bahan mentah Industri, sehingga banyak kekuatan yang saling mempengaruhi guna memperebutkan pasar perdagangan internasional.

FAKTOR PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI INTERNASIONAL

Dalam masa ini perkembangan politik dan ekonomi internasional sudah meningkat pada fokus perhatian yang berbeda dengan masa pasang naik dekolonisasi awal tahun 1950an. Pada masa ini semangat solidaritas diantara negara-negara di Asia Afrika yang tercermin dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung menampilkan tokoh-tokoh seperti : Soekarno, Jawahar nehru, Zhou Enlai mulai bergeser ke benua Afrika dan Amerika latin.

Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Gerakan Non Blok telah menelorkan pembahasan persoalan-persoalan lama yang tadinya disihkan untuk sementara oleh para pemimpin angkatan pertama kemerdekaan atau pemimpin masa itu, yaitu bagaimana menyusun suatu wadah atau dalam bentuk organisasi agar semangt yang lahir dari perpaduan faktor-faktor sejarah, geopolitik dan ekonomi internasional pada tahun 1955 dapat diteruskan ke suatu gerakan yang bersifat transkontinental.

Dalam pergeseran politik internasional ada faktor yang menentukan di kawasan Asia Tenggara, yaitu perpecahan dalam kubu komunis antara RRC dan Uni Sovyet. Pada masa pemerintahan Demokrasi terpimpin fakta menyebutkan bahwa Soekarno lebih cenderung pada kekuatan Cina. Hal lain adanya ancaman perang Vietnam membuat kekuatan baru untuk menentang kekuatan Kapitalis Barat yang didukung oleh kekuatan Cina. Muncunya Economic Triangel (Amerika-Eropa BaratJepang) mempunyai dampak sisi negatif dengan semakin terkonsentrasinya kekuatan ekonomi moneter pada tiga kelompok segitiga ekonomi tersebut, dan hal ini membuat negara-negara lain nya menjadi tidak berdaya (Ali murtopo, 1978:187).

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah kritis, dengan tahap-tahap penelitian: pemilihan dan seleksi sumber-sumber subyek (sejarah),

kritik sumber yakni kritik secara intern dan ekstern ketiga, sumber-sumber tersebut dianalisa dengan pendekatan berdasarkan konsep-konsep dan variabel yang relevan; keempat, selanjutnya sumber-sumber yang dapat dipercaya tersebut disusun dalam suatu ceritera sejarah, yang disebut historiografi atau penulisan sejarah (Gottschalk, 1983).

Data-data yang digunakan berupa kata-kata hasil wawancara, Dokumen, cara ini dilakukan dengan harapan agar dapat menangkap berbagai informasi kualitatif historik dari suatu proses kejadian di lapangan dengan deskripsi yang penuh nuansa (Bogdan & Biklen, 1982). Sumber-sumber data yang digunakan manusia dengan segala aktifitasnya, peristiwa lampau, dokumen dan benda-benda sebagai instrumen penelitian lainnya, yang meliputi : Informan dan Dokumen, yang berupa arsip yang ada diperpustakaan Nasional, laporan-laporan dan catatan pribadi lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepth interviewing), mencatat dokumen dan arsip atau content analysis (Yin, 1987: 43), yang tidak hanya akan mencatat semua yang tersurat, tetapi juga yang tersirat (makna) dalam setiap dokumen maupun arsip serta bentuk-bentuk catatan kegiatan lainnya.

Teknik analisa data menggunakan teknik analisis historis kualitatif yang didasari cara berfikir sinkronik dan diakronik.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Politik Luar Negeri Indonesia Ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia lebih sering disebut konfrontasi sebenarnya merupakan perjalanan sejarah hubungan bilateral antar ke dua negara ini. Kebijakan konfrontasi yang dipilih oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin merupakan konsekuensi logis jawaban dari kepentingan nasional Indonesia dalam menjawab permasalahan nasional Indonesia. Karena segala keputusan ini diambil berpijak pada seperangkat putusan yang menjadi landasan dalam men capai sasaran di luar negeri yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pengambil kebijakan (Perwira, 1992 :87). Kata lain bahwa kebijakan politik luar negeri untuk berkonfrontasi dengan Malaysia adalah merupakan jawaban akan kebutuhan politik nasional pada waktu itu (Kessinger, 1985, 124).

Kebijakan politik luar negeri Indonesia menurut Juwono Sudarsono (1985: 125) dapat dilihat dari tiga aspek yang saling terkait, yaitu : Aspek sejarah dan kemauan subyektif manusia Indonesia, aspek geopolitik Indonesia

dan aspek perkembangan politik dan ekonomi Internasional. Aspek sejarah dan kemauan manusia Indonesia dihubungkan dengan kebesaran bangsa Indonesia dalam mengukir perjalanan hidup yang mampu menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa besar dengan berdirinya kerajaan Sriwijaya dan kebesaran Kerajaan Majapahit, berdirinya mataram Hindu, Mataram Islam yang mampu berkuasa dari ujung timur sapai ujung barat daratan di Asia Begitu pula sejarah telah mengukir kebesaran dan kegagahan perjuangan para pemuda dalam mengusir penjajahan Belanda dan pendudukan tentara Jepang dari bumi nusantara.

Pada perjalanan sejarah selanjutnya, kebesaran Sukarno - Hatta dalam mengawal bangsa Indonesia secara revolusioner mampu menunjukkan keperkasaan Indonesia sebagai bangsa yang pemberani di Asia, dan Internasional. Sukarno mampu membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mampu menunjukan eksistensinya dengan sifat konfrontatif. Sehingga pada tanggal 13 February 1963 secara konfrontatif Sukarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai bentuk praktek kolonialisme baru yang dapat mengganggu kepentingan nasional bangsa Indonesia. Faktor geopolitik terkait erat dengan letak geografis Indonesia yang mempunyai nilai strategis baik itu secara regional maupun guna kepentingan nasional, bahkan internasional. Ini terkait erat dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik hankam dan kepentingan internasional lainnya berkaitan erat dengan kebutuhan global yang mencakup hidup dunia internasional. Tanpa berbuat sesuatu bangsa Indonesia telah diperkuat oleh letak geografisnya, tetapi sebagai konsekuensinya justru tata letak inilah juga mempunyai kelemahan berupa ancaman masuknya pengaruh asing dalam segala bidang kehidupan. Aspek yang ketiga adalah perkembangan politik dan ekonomi internasional, yaitu terjadinya perubahan dan perkembangan politik dan ekonomi internasional yang sudah berubah fokus perhatannya pada perubahan semangat solidaritas diantara negara-negara Asia - Afrika yang tercermin dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menampilkan tokoh-tokoh Asia Afrika seperti Sukarno, Jawaharlal Nehru, Zhou Enlai. Konferensi ini akhirnya mampu melahirkan gerakan Non Blok.

Faktor Kepemimpinan Nasional Kebijakan politik luar negeri sebagai bagian dari serangkaian kebijakan suatu pemerintahan dalam kurun waktu tertentu sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari corak pemerintahan suatu

negara. Menurut Lawrence S Falkowski bahwa peran variabel individu memegang peran kunci dalam foreign policy decision making (1988 : 87).

Keberadaan tokoh sentral *man behind the gun* pengambil kebijakan politik luar negeri Indonesia sangat berpengaruh terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia Malaysia dan Indonesia, Sukarno dan Tunku Abdul Rahman. Bernard Dahm (1987) menyatakan bahwa Sukarno adalah seorang tokoh ratu adil dalam tradisi masyarakat Jawa yang sangat dipengaruhi oleh tokoh Bima dalam pewayangan, yang akhirnya sifat ini sangat menonjol dalam pengembangan intelektual dan tingkah laku politiknya pada tahun-tahun berikutnya. Secara terus terang dalam setiap pidato politiknya, Sukarno yang revolusioner menyatakan kebenciannya pada imperialisme dan neo kolonialisme barat.

Secara kontroversial bahwa imperialisme harus ditentang dengan paham konsep sosialisme Pancasila dengan tiga pilar, yaitu : agama, nasionalisme dan komunisme. Sebaliknya, Tunku Abdul Rahman juga merupakan tokoh internasional yang mampu menghipnotis para lawan dan kawan politiknya. Ada berbagai persamaan antara ke dua tokoh ini, yaitu : 1. Keduanya merupakan bapak pendiri bangsa, 2. Sama-sama bergaya flamboyan, 3. Keduanya akhirnya ditinggalkan oleh pengikutnya. Abdurahman adalah seorang tokoh Umno, sebuah partai yang dominan dalam pemerintahan Malaysia. Sebagai manifestasi kekerasan sikap dan sifat politik beliau adalah diabaikannya kepentingan Indonesia atas masalah Kalimantan Utara.

Proses Normalisasi Hubungan Bilateral Indonesia Malaysia Konfrontasi Indonesia Malaysia mencapai klimaks ketika berakhirnya kekuasaan Sukarno karena munculnya Orde Baru, yang dipelopori oleh Suharto. Dengan munculnya Supersemar 11 Maret 1966, maka arah politik Indonesia dengan Malaysia mengalami pergeseran dari konfrontasi menuju normalisasi.

Dengan adanya Supersemar, memberikan kekuasaan *de facto* kepada Suharto telah membawa babak baru munculnya Orde Baru sebagai kekuatan politik. Orde Baru merupakan tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang diletakan atas pemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 (Panitia Penulisan Sejarah Deplu RI, 1970). Proses penyelesaian konflik Indonesia dan Malaysia melalui jalan terjal dan berliku. Sebagai kekuatan politik baru dalam pengambilan kebijakan Suharto berusaha untuk memperoleh dukungan parlemen dengan cara menambah keanggotaan DPRS dari 360

menjadi 460, dengan komposisi 360 dari partai politik, 75 dari militer, dan 25 orang dari sipil.

Dengan dukungan penuh tersebut Suharto dapat melaksanakan kebijakan politik luar negeri termasuk kebijakan proses normalisasi hubungan dengan Malaysia. Selain berusaha mengejar ketinggalan ekonomi, Suharto mampu membawa kredibilitas nama Indonesia dalam forum internasional dengan masuknya Indonesia dalam forum PBB pada tanggal 28 September 1967, dan berusaha memperbaiki hubungan politik dengan Malaysia sebagai langkah kebijakan diakhirinya konfrontasi regional di Asia Tenggara. Dengan berakhirnya konflik dengan Malaysia diharapkan adanya stabilitas nasional masing-masing negara ASEAN, yang merupakan jaminan kondusif terselenggaranya pembangunan nasional dalam bidang ekonomi.

Langkah-Langkah Penyelesaian Konfrontasi Indonesia dan Malaysia Usaha-usaha kearah penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia telah banyak dilakukan. Seperti misalnya pertemuan Tokyo dan Manila di dalam kerangka maphilindo tetapi selalu gagal. Beberapa negara juga telah mengupayakan perdamaian dengan cara memfasilitasi pertemuan, seperti misalnya Presiden Lyndon B. Johnson mengirim Jaksa Agung Robert Kenedy guna menengahi pertikaian ini. Negara Jepang juga berusaha memfasilitasi pertemuan tetapi kesemuanya gagal. Kegagalan senjata dan tuntutan Malaysia atas mundurnya pasukan Indonesia dari wilayah Malaysia mendorong Perdana Menteri Thailand Thanat Khoman untuk mengadakan pertemuan Bangkok. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Subandrio, Razak, dan Lopez meskipun pada akhirnya pertemuan ini juga mengalami jalan buntu.

Kegagalan PKI dalam pemberontakan menyebabkan Angkatan bersenjata Indonesia untuk ikut tampil dalam politik nasional Indonesia. Dengan di motori kelompok kecil dalam ABRI yaitu KOSTRAD mengambil inisiatif untuk merintis kegiatan-kegiatan kearah normalisasi (Hidayat Mukmin, 1966 : 107). Kegiatan-kegiatan kearah normalisasi ini sebenarnya telah dilakukan oleh TNI – AD melalui operasi kontak-kontak intelijen sebelumnya. Kegiatan ini dibangun oleh Suharto selaku Pangkostrad yang dibantu oleh Letkol Ali Murtopo dengan Opsusnya dengan tiga alasan, yaitu : Pertimbangan strategi militer, pertimbangan politis, pertimbangan ekonomis.

Usaha-Usaha Diplomatik Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia Malaysia. Pada tanggal 30 Juli 1966 Kogam sebagai lembaga koordinasi tertinggi yang berwenang menentukan kebijakan nasional memutuskan untuk menyetujui

hasil pertemuan Bangkok. Persiapan kearah normalisasi adalah prasyarat terhadap status Sabah dan Serawak. Persetujuan normalisasi hubungan dua negara ini terealisasi dalam Persetujuan Jakarta. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1966, terjadi kesepakatan antara Adam Malik dan Teungku Abdul Razak. Kebijakan politik luar negeri Adam Malik melalui jalur diplomatik didukung oleh MPRS tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia, kemudian ini direalisasikan ditanda tangannya retifikasi Persetujuan Jakarta oleh Soekarno pada tanggal 27 oktober 1966 dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia dimantapkan dalam peranan Indonesia dalam pembentukan organisasi kerjasama regional Asia Tenggara atau ASEAN, dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Adapun bentuk-bentuk realisasinya berupa kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, pertanian, dan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Murtopo, 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta : Yayasan prokalmasi-CSIS -----, 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : CSIS
- Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Reseach for Educations : an Inctruduction to Theory and Methods*. Boston : Mass Allyn and Beacon, Inch.
- Juwono Sudarsono, 1984. *Bebas Aktif di Tengah Dunia* , Prisma, Jakarta
- Yin, R. K. (1987). *Case Study Research : design and metohods*. Baverly Hills, C: Sage Publications.